

Policy Brief

Pengelolaan Sampah

di Daerah Pariwisata Prioritas



KONDISI PERSAMPAHAN SAAT INI

2,12

MILIAR TON SAMPAH

ditimbun setiap tahunnya di seluruh dunia

(World Bank 2018)



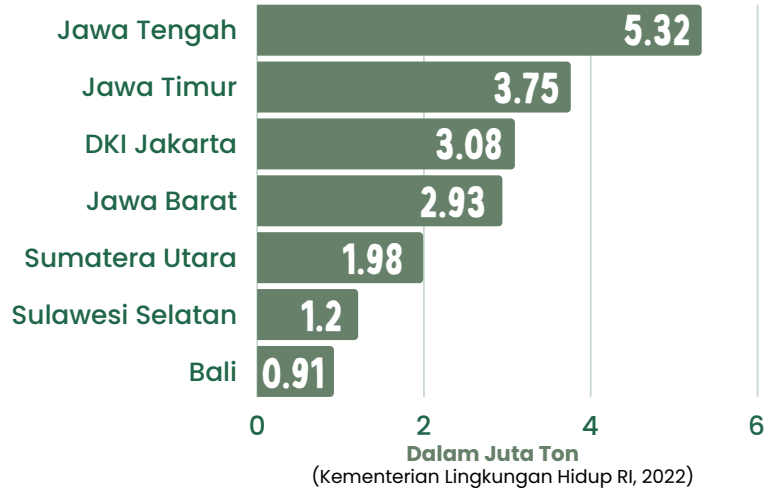
21

JUTA TON SAMPAH

dihasilkan Indonesia pada tahun 2021

(Walhi 2022)

PROVINSI DENGAN TIMBUNAN SAMPAH TERBANYAK PER TAHUN (DALAM JUTA TON)



SAMPAH DI DAERAH PARIWISATA

• 150.688

pengunjung di 8 gunung menghasilkan

• 453

ton sampah/tahun
(Survei Sapu Gunung, 2016)

- Apabila pariwisata tetap dijalankan dengan skema *business as usual* pada 2050 timbunan sampah akan **meningkat** sebesar

251%

(UN Environment)



MAJOR PROJECT DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

Sebelumnya, 8 dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dipromosikan pada pertemuan IMF-WB di tahun 2018 dengan nama

dan diharapkan destinasi tersebut bisa menyamai Bali dalam hal popularitas. Sehingga dapat dikatakan Bali menjadi *benchmark* untuk destinasi-destinasi yang baru akan dikembangkan ini.

10 BALI BARU



Danau Toba



Borobudur



Lombok-
Mandalika



Labuan Bajo



Manado-
Likupang



Bangka
Belitung



Bromo Tengger
Semeru



Wakatobi



Morotai



Raja Ampat

Lima destinasi di baris atas **diprioritaskan** dengan nama **Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)**, sedangkan destinasi baris bawah masuk pada fokus berikutnya.

PRAKTIK BAIK PROVINSI BALI

dalam pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di Daerah Pariwisata Prioritas



- Perda Pembatasan Sampah Plastik
- Perda Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
- Perda Pengelolaan Sampah Berbasis Desa

SINERGI KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH

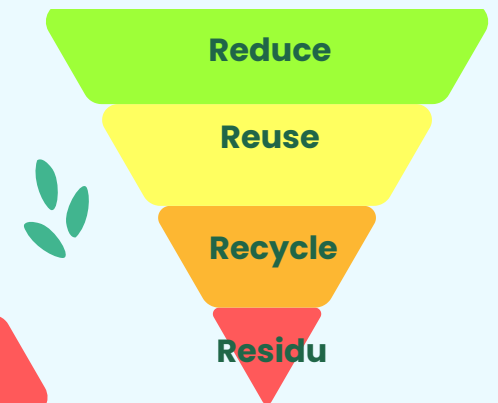
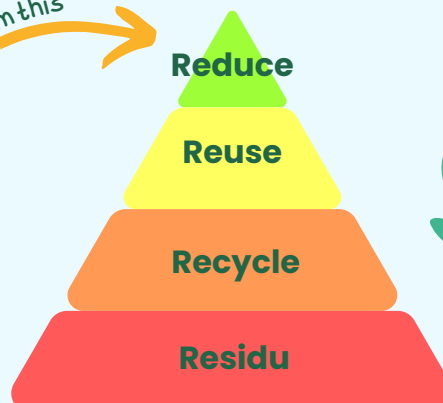


- Pengelolaan Sampah dengan Aturan Adat
- Pengelolaan Sampah dengan Memerhatikan Perekonomian Sekitar

PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN MEMERHATIKAN KEARIFAN LOKAL



from this



to this

PERUBAHAN PARADIGMA DARI SEMUA ELEMEN DI BALI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengelolaan Sampah di Daerah Pariwisata Prioritas

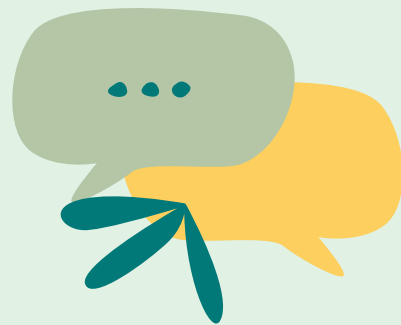
1 ASPEK GEOPOLITIK

- Arahan khusus kepada Kabupaten/Kota di wilayah DPP untuk mengelola sampah secara terintegrasi, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur.
- Transfer anggaran berbasis pengelolaan sampah, makin banyak sampah dikurangi makin besar yang diterima, sehingga daerah sekitar DPP akan terinsentif untuk berkompetisi.



2 ASPEK GEOSTRATEGIS

- Kerjasama dengan beberapa negara dengan *concern* lingkungan tinggi, untuk berinvestasi pengelolaan sampah di wilayah DPP.

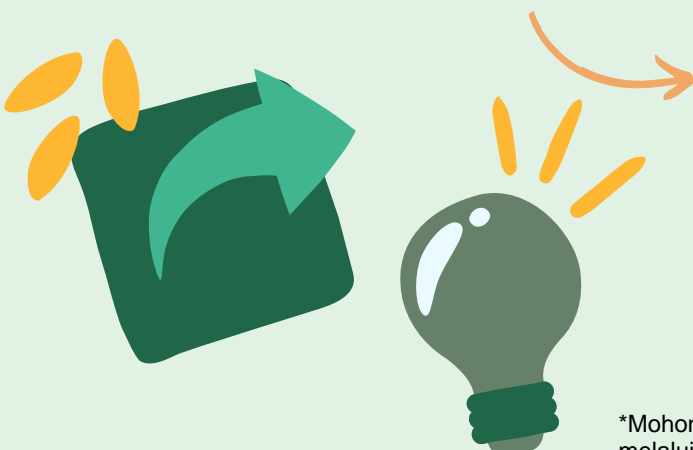


3 ASPEK BISNIS

- Kewajiban bagi investor/pengusaha hotel dan restoran baru untuk mempunyai sistem pengelolaan sampah mandiri terstandarisasi.
- Skema insentif untuk masyarakat, seperti tarif premium untuk tempat wisata dengan standar tertentu dalam pengelolaan sampah.

4 ASPEK SOSIAL BUDAYA

- Pengawasan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat pada pasar tradisional yang berada di kawasan DPP.
- Mengedepankan kearifan lokal daerah setempat (tradisi dan aturan adat) untuk mengatasi masalah sampah.



*Mohon mengisi kuisioner tanggapan atas kajian di atas melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/PbriefPAKKSeptember2022Ridwan>